

PERUBAHAN POLA HUBUNGAN INTERNASIONAL ABAD 20 DAN PENGARUHNYA TERHADAP REALISME VERSUS IDEALISME

Yuniarti¹

Abstract

Issues shifting in international relations have resulted in the shifting of approaches in international relations and affairs. The approaches which being explained in this article are realism and idealism/utopianism. During the twentieth century, there were drastic issues shifting which makes the relevance of realism and idealism were in questions. In the beginning to the middle of twentieth century, the most popular issue was power politics, the matter of peace and war. During the three wars – World War I, World War II, and Cold War – realism achieved its triumph, breaking down the idealism and its utopian assumptions. But, in the second half of the century, the issue have shifted toward peace and cooperation ones marked by the collapse of the Soviet Union and the rise of regionalism in the world. It regenerated idealism offers though realism did not lose its power either. It simply shows that issues shifting generates the approach relevance shifting in international relations. The triumph of one approach doesn't means diminishing or shinking the importance of certain approach, since international relations issues vary in nature so these could be viewed by various approach or viewed by related approach based on the nature.

Keywords: international relations, realism, idealism

Pendahuluan

Pola interaksi hubungan internasional sangat dipengaruhi oleh isu-isu yang berkembang di tingkat internasional. Ketika terjadi perubahan, pergeseran atau perluasan isu-isu maka pola hubungan pun mengalami perubahan. Peristiwa yang menjadi titik balik perubahan dalam pola hubungan internasional dalam satu dasawarsa terakhir adalah berakhirnya Perang Dingin, yang ditandai dengan dicapainya kesepakatan antara Reagan – Gorbachev dan *Strategic Arms Reduction* (START) 1989 dan runtuhnya Uni Soviet 1991.

¹ Dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, FISIP Universitas Mulawarman. Alamat: Jl. Muara Muntai No.1 Kampus Gn.Kelua Samarinda 75119. Telp/Facs. 0541-741312.

Perubahan pola hubungan internasional ini lebih jauh mengubah fokus studi hubungan internasional, dan menimbulkan permasalahan baru, antara lain, perubahan apa yang terjadi selama periode 1990-an?; sejauh mana perubahan yang terjadi mempengaruhi pandangan realis dan idealis?; dan bagaimana relevansi teori-teori hubungan internasional yang ada dalam menjelaskan perubahan pola hubungan internasional dewasa ini?

Perubahan Pola Hubungan Internasional 1990-an

Peristiwa-peristiwa akhir 1980-an dan awal 1990-an, era pasca Perang Dingin, menunjukkan bagaimana situasi dan kondisi dapat berubah dengan cepat, seperti runtuhnya Tembok Berlin dan reunifikasi Jerman, perpecahan blok Timur, flirtasi Uni Soviet dan masyarakat komunis lainnya dengan ekonomi pasar, gerakan perdamaian di Afrika dan bagian dunia lainnya, dan sebagainya, hingga invasi Iraq ke Kuwait. Dalam banyak hal, perkembangan ini dapat dipandang sebagai puncak dari pertumbuhan pragmatasi kekuasaan aliansi di dunia internasional.

Pembicaraan yang sangat menarik dalam lingkup hubungan internasional seperti tatanan pasca Perang Dingin, dengan beberapa argumen adalah bahwa apa yang sedang berjalan adalah suatu akhir dari sistem dunia bipolar (atau bi-multipolar) pasca Perang Dunia II dan kembali pada bentuk sistem multipolar yang menjadi karakteristik hubungan internasional antara 1948 hingga 1945, dan 1990-an akhir ketika regionalisme merebak di berbagai belahan dunia, dan bahwa kemanusiaan berada di tengah-tengah pergeseran yang menyeluruh dan fundamental dari sistem negara bangsa Westphalia menuju suatu sistem baru yang sempurna, yaitu *post-international politics* (Pearson, 1992: 563).

Memasuki tahun 1990-an muncul istilah baru dalam hubungan internasional, yaitu the new world order (tata dunia baru) dan the new economic order (tata ekonomi dunia baru) yang memfokuskan pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, kerja sama ekonomi dan usaha menjembatani ketimpangan ekonomi Utara (negara-negara maju) dengan Selatan (negara-negara berkembang dan miskin).

Dalam periode ini terjadi perubahan besar dan mendasar dalam tata dunia, transformasi dari era perang bintang antara Amerika Serikat (AS) – Uni Soviet ke perang dagang AS – Uni Eropa; pergeseran isu keamanan dan militer menjadi isu keamanan non-militer, seperti ekonomi, lingkungan hidup, hak asasi, demokrasi, kesehatan dan sebagainya; dan perubahan menjadi multipolar.

Sekurang-kurangnya ada empat hal penting yang menandai bahwa terjadi perubahan pola hubungan internasional, yaitu:

1. Berakhirnya Perang Dingin yang merupakan titik balik perubahan rejim internasional. Peristiwa ini juga menandakan berakhirnya komunisme yang didahului oleh kemunduran Uni Soviet sebagai salah satu *superpower*, karena krisis ekonomi dan politik dalam negeri. Akibatnya Uni Soviet tidak mampu mempertahankan kekuatan militer globalnya dan tidak mampu menyaingi AS. Pergolakan etnis mengakibatkan keruntuhan Uni Soviet, yang kemudian terpecah-pecah menjadi banyak negara-negara kecil yang independen, kecuali Rusia, dengan kemampuan ekonomi sangat terbatas, seperti Yugoslavia (Sekarang terpecah lagi menjadi Kroasia, Bosnia dan Herzegovina), Czechoslovakia, Hungaria, Polandia, dan seterusnya (Short, 1993: 54). Sejalan dengan itu, kapitalisme mulai merambah ke negara-negara sosialis komunis seperti Rusia, Cina, Kuba, Vietnam dan Korea Utara. Ini dibuktikan dengan masuknya Cina dalam WTO dan campur tangan IMF dalam krisis ekonomi Rusia.
2. Runtuhnya Uni Soviet telah mengubah peta hubungan antar negara dan peta kekuatan negara-negara besar di dunia. AS dinobatkan menjadi satu-satunya negara adi kuasa di dunia, dengan kemampuan militer yang sangat besar dan canggih. Ini diperlihatkan dalam kemenangan aliansi yang dipimpinya ketika berhasil memukul mundur Iraq dari Kuwait dalam Perang Teluk II, 1991, hingga penyerangan AS ke Afganistan tahun 2001.

Meskipun demikian, AS tidak bisa mengubah opini dunia yang memandang bahwa pada dasarnya AS bukanlah pemimpin dunia dan

superpower jika tidak didukung oleh sukutu-sekutunya, terutama, terikat dalam NATO, sering kali bersikap netral terhadap kebijakan luar negeri AS yang cenderung intervensionis dan unilateralis. Bahkan di akhir tahun 1980-an, China muncul menjadi kekuatan militer dunia baru yang menyaingi AS (Rourke, 1989: 123).

3. Meningkatnya interdependensi ekonomi, perdagangan dan moneter antar negara dan munculnya kekuatan-kekuatan ekonomi baru. Kedua fenomena ini memperlihatkan pergeseran dalam dinamika hubungan internasional dari lingkup politik – militer ke lingkup pembangunan sosial – ekonomi.

Munculnya kekuatan-kekuatan ekonomi baru di dunia yang menyaingi atau menjadi *counter-balanced* bagi kemampuan ekonomi AS, seperti Uni Eropa, Jerman dan Jepang. Lebih jauh, kekuatan-kekuatan ekonomi yang baru ini kemudian mampu membentuk posisi tawar menawar yang seimbang dengan AS dalam forum-forum internasional seperti WTO, sehingga AS tidak bisa memaksakan kepentingannya atas negara-negara ini.

Perekonomian AS mengalami kemunduran sejak 1987 ketika terjadi defisit anggaran US\$ 221 milyar dan defisit perdagangan US\$ 159 milyar. AS kehilangan vitalitas ekonominya karena pengeluarannya terfokus pada bidang militer dan mengabaikan pembangunan ekonomi (Rourke, 1989).

Sebaliknya, kebijakan pembendungan komunis AS melalui Marshal Plan, telah menjadi sekutu-sekutunya tumbuh menjadi kekuatan ekonomi yang tangguh, yang menyaingi dan mengancam kontrol AS atas banyak peristiwa di dunia internasional. Uni Eropa tumbuh menjadi kekuatan ekonomi dunia yang luar biasa ketika berhasil mencapai pembangunan ekonomi sampai pada tahap integrasi ekonomi total dengan pasar tunggalnya 1993, dan mata uang tunggalnya Euro 2002.(Fontaine, 1995: 14). Sedangkan Jepang, yang disebut sebagai *the first tier of East Asian Miracle*, berhasil menjalankan proses pembangunan ekonomi industri yang sangat ketat pasca PD II, dan mencapai pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia pada awal 1990-an.

Bahkan Jepang bersama-sama dengan Jerman tumbuh menjadi *the New Civilian Power*, negara-negara yang kohesif secara ekonomi dan sosial (Jomo, 1997:1).

4. Meluasnya faham demokrasi.

Demokrasi tidak hanya berarti pluralisme, kebebasan berekspresi atau akses ke informasi, tetapi juga membutuhkan kesediaan tanpa paksaan dari berbagai kalangan dan kelompok untuk bekerja sama dalam sistem pemerintahan yang damai. Jika setiap orang menginginkan kebebasan tetapi tidak ada kesediaan untuk bekerja sama maka yang terjadi adalah anarkhi, bukan demokrasi. Menguatnya proses demokratisasi tahun 1990-an sangat menonjol di Eropa Timur dan Tengah setelah runtuhnya komunisme Soviet, dan di Asia setelah krisis ekonomi melanda sejak 1997. Proses demokrasi ini biasanya dicirikan dengan kritikan terhadap sistem pemerintahan yang terdahulu, dari pada usaha bersama untuk mencari solusi untuk masa depan.

Konflik tentang sistem politik dan pemerintahan seperti berputar pada masalah tuntutan demokrasi dan partisipasi politik. Proses demokratisasi ini sangat beragam dan problematis. Di beberapa tempat seperti di Eropa Timur dan Tengah, gerakan-gerakan baru dengan proyek non-kekerasan memperluas ruang bagi pemerintahan sipil. Tetapi, ada pula yang tidak memiliki dorongan kuat untuk proses demokratisasi akibat sistem yang kaku seperti di Afrika dan Timur Tengah. Bahkan, ada pula yang tidak memiliki tradisi pemerintahan, meskipun ada kebijakan politik untuk memperkenalkan sistem demokrasi, seperti yang terjadi di Uni Soviet. Proses demokrasi dalam masyarakat pluralis seperti di Uni Soviet, justru menghidupkan konflik-konflik yang terpendam. Demokratisasi melahirkan banyak tuntutan untuk kemerdekaan. Ini dicirikan dengan konfrontasi terhadap pemerintahan pusat dan konflik antara etnis.

Perubahan pola hubungan internasional dalam sistem bipolar menjadi multipolar membawa konsekuensi munculnya beragam aktor-aktor dalam hubungan

interansional kontemporer. Dalam sistem multipolar, konsep superpower berlaku relatif, tidak mutlak. Suatu negara dikatakan *superpower* tergantung pada konteks dalam bidang apa dan dihadapkan pada siapa. AS, misalnya, menjadi superpower ketika berhadapan dengan negara-negara Amerika Latin atau Asia Tenggara, tetapi tidak jika berhadapan dengan Uni Eropa, Jepang dan Israel. Ada kekuatan-kekuatan baru yang bermunculan, baik di bidang ekonomi maupun militer, yang membagi kekuatan dunia di tangan beberapa negara sehingga menciptakan keseimbangan baru dalam hubungan internasional. Di samping itu, negara bangsa atau pemerintahan nasional tidak lagi menjadi aktor dominan. Ada banyak aktor seperti *Inter-Governmental Organizations* (IGOs) seperti IMF, IBRD dan WTO; *Non-Governmental Organizations* (NGOs) seperti Green Peace, IRC, dan WWF; dan *Multi National Corporations* (MNCs) seperti McDonald, Caltex, dan Del Monte. Dan dalam dasa warsa terakhir aktivitas aktor-aktor ini meningkat pesat dibanding peran aktor negara, bahkan dalam banyak hal, terutama dalam bidang ekonomi perdagangan, aktor-aktor ini menggantikan peran negara.

Pergeseran isu politik-militer ke isu ekonomi semakin meluas ke permasalahan sosial dan politik domestik yang kemudian terinternasionalisasi akibat globalisasi. Isu-isu ini antara lain adalah masalah-masalah lingkungan hidup, kesehatan, perburuhan, demokrasi, hak asasi manusia, gender, dan sebagainya. Masalah-masalah ini telah mengglobal dan menjadi tanggung jawab bersama setiap aktor hubungan internasional. Globalisasi telah mengaburkan batas kedaulatan nasional suatu negara, sehingga intervensi suatu negara atas negara lainnya seringkali terjadi, terutama ketika intervensi menyangkut isu-isu kemanusiaan.

Kerusakan hutan sebagai paru-paru dunia, seperti yang terjadi di Indonesia dan Meksiko, dan pemanasan global akibat efek rumah kaca akibat industri-industri negara-negara maju seperti AS dan Jepang, tidak lagi menjadi masalah nasional negara yang bersangkutan. Masalah ini telah menjadi isu global yang menjadi tanggung jawab kolektif warga dunia, karena kerusakan ini akan merusak ekosistem dunia dan akan membahayakan kelangsungan hidup seluruh umat manusia.

Pengaruh Perubahan Terhadap Realisme *versus* Idealisme

Di tingkat wacana teori hubungan interansional, perubahan pola hubungan internasional dan pergeseran isu ini telah menggeser dominasi pendekatan realisme dalam menjelaskan fenomena-fenomena internasional yang terjadi dalam periode ini. Realisme yang tumbuh sebagai reaksi terhadap utopianisme atau idealisme, nampaknya kembali digeser oleh idealisme. Realisme yang mendominasi studi hubungan internasional sejak berakhirnya Perang Dunia I hingga Perang Dingin, mulai kehilangan pengaruhnya ketika menjelaskan meningkatnya interdependensi antar bangsa dan antar negara di tahun 1990-an.

Dalam menjelaskan hubungan internasional, kelompok realis berpegang pada beberapa asumsi, yang antara lain adalah: opini publik berubah dengan mudah dan cepat sehingga tidak bisa dijadikan acuan dalam pembuatan keputusan; negara bangsa adalah unit analisa utama; negara bangsa mempunyai tujuan nasional yang berpotensi konflik yang kadang-kadang mengarah pada peperangan; negara harus mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku negara lain; kemampuan nasional sangat mempengaruhi hasil peperangan; kemampuan nasional mencakup bidang militer dan non-militer (tingkat teknologi, populasi, sumber alam, faktor geografi, bentuk pemerintahan, kepemimpinan politik dan ideologi); manajemen konflik yang paling memungkinkan adalah *balance of power*, karena tidak akan ada satu negara yang mempunyai hegemoni internasional; dan prinsip moral tidak dapat diterapkan untuk tindakan-tindakan politik (Morgenthau, 1967: 4-17).

Sehubungan dengan kemampuan negara dan kepemimpinan nasional, kelompok realis berpendapat bahwa para pemimpin harus: bertanggung jawab akan layanan keamanan negara, mempertahankan atau jika perlu memperluas posisi negaranya terhadap negara lain melalui kompetisi, diplomasi atau jika keduanya gagal maka dengan cara perang; mempertahankan kepentingan nasionalnya dan sistem negara secara kolektif; dan mengembangkan sistem nilai yang dianutnya untuk mempertahankan posisinya di dunia internasional (Miller, 1990: 208).

Dengan asumsi-asumsi yang demikian, realis mengkritik idealisme yang didasari pemikiran Wilson, yang berpendapat bahwa perdamaian dunia dapat dijaga dengan sistem keamanan kolektif. Idealisme menekankan solusi moral untuk mengatasi permasalahan dunia. Menurut realis, prinsip-prinsip moral telah gagal mengatasi permasalahan dunia, yang dibuktikan dengan pecahnya Perang Dunia I. Komitmen terhadap standar normatif internasional berlangsung singkat, dan organisasi internasional seperti Liga Bangsa-Bangsa hanya impian idealisme yang sama sekali tidak bisa mengubah perilaku negara-negara secara fundamental, seperti yang ditentukan dalam standar normatif internasional. Masing-masing negara terus memperebutkan kekuasaan dan berkompetisi untuk memenuhi kepentingan nasionalnya yang beragam, dan hal ini akan menciptakan peperangan di masa depan, seperti yang terjadi di masa lalu dalam PD I dan PD II. Pemikiran-pemikiran seperti inilah yang membenarkan slogan *si vis pacem para bellum / if you want peace, prepare for war* (Ziegler, 1984: 208).

Dalam beberapa hal, pemikiran realis mengandung kebenaran, seperti bahwa negara mempunyai kepentingan yang beragam yang dalam pencapaiannya sering kali berbenturan dengan kepentingan negara lain sehingga menimbulkan ketegangan atau konflik terbuka; setiap negara cenderung mengejar kekuasaan dan pengaruh yang seluas-luasnya dalam politik dan hubungan internasional dalam rangka memenuhi kebutuhan akan rasa aman dari ancaman pihak luar; dan LBB atau bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak mempunyai otoritas dan wewenang mutlak untuk mengatur, mengikat atau memaksa masyarakat internasional untuk mematuhi hukum-hukum dan norma-norma internasional.

Meskipun demikian, memasuki periode 1990-an, dimana hubungan internasional ditandai dengan semakin meningkatnya saling ketergantungan global, dan dominasi isu ekonomi atas politik, muncul beberapa penyangkalan terhadap pemikiran-pemikiran realisme ini. Penyangkalan-penyangkalan ini antara lain: bahwa negara bukan lagi aktor tunggal yang mendominasi hubungan internasional; konflik kepentingan antar negara bisa diselesaikan dengan cara-cara damai (perundingan)

dalam forum-forum internasional; moralitas bisa dijadikan acuan dalam pengambilan kebijakan luar negeri suatu negara, dasar pembentukan hukum internasional, dan tindakan politik terutama yang berkaitan dengan bidang-bidang kemausiaan seperti hak asasi manusia; untuk mempertahankan keamanan nasional, tindakan defensif lebih diutamakan daripada tindakan agresif; keamanan tidak hanya diartikan dalam batasan militer, tetapi juga keamanan sosial ekonomi; dan meskipun organisasi internasional dan hukum internasional tidak mempunyai kekuatan mengikat, konflik antar negara bisa ditekan oleh kedua institusi ini, karena interaksi para aktor dalam hubungan internasional memerlukan kerangka legalitas yang mengaturnya dan ada kewajiban moral untuk mematuhi aturan main yang telah disepakati bersama, minimal oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu untuk menjaga perdamaian dunia, tidak diperlukan lagi pemupukan kekuatan militer untuk perang, tetapi dengan menjalin dan meningkatkan kerja sama internasional.

Meningkatnya interdependensi dan kerja sama internasional, serta meluasnya regionalisme, menyebabkan pendekatan realisme kurang populer dan ada kecenderungan kuat untuk kembali pada pendekatan idealisme dan utopianisme, dan pragmatisme. Hal ini menempatkan idealisme menjadi pendekatan yang dipandang bisa menjelaskan fenomena internasional kontemporer. Meskipun demikian, dalam batasan-batasan tertentu, realisme masih menjadi acuan dalam menjelaskan hubungan internasional saat ini. Oleh karena itu, pergeseran dari satu pendekatan ke pendekatan lainnya tidak berlaku mutlak, dalam arti dominiasi satu pendekatan mematikan pendekatan lainnya.

Melihat pada situasi dan kondisi politik dan hubungan internasional kontemporer, ada beberapa pembenaran terhadap pemikiran-pemikiran idealisme dan utopianisme tentang cara-cara menuju perdamaian dunia, antara lain tentang *world government* (pemerintahan dunia), *international law* (hukum internasional), *balance of power* (perimbangan kekuasaan), *collective security* (keamanan kolektif) dan *concert of power*.

1. *World Government*

Dalam WG, perang atau anarki internasional yang terjadi karena tidak ada otoritas yang mencegahnya. Perang akan dieliminir ketika dunia diatur dan berjalan seperti satu bangsa. Akan tetapi, banyak konflik internasional muncul karena kegagalan pemerintah nasional menjaga perdamaian atau terjadi diluar kontrol pemerintahan nasional, karena ancaman perdamaian tidak hanya datang dari individu tetapi juga kelompok-kelompok terorganisir (Ziegler, 1984: 133-140). Jika kita melihat pada perkembangan Eropa Barat, pemerintahan dunia menjadi suatu hal yang memungkinkan dengan terbentuknya *United State of Europe* seperti halnya *United State of America*. Akan tetapi dalam politik internasional kontemporer, ide ini sulit diwujudkan karena kecil kemungkinan ada pemerintahan suatu negara menyerahkan kedaulatan nasionalnya pada institusi internasional yang disebut WG, dengan berbagai alasan seperti nasionalisme, distorsi ekonomi dan sebagainya. Selain itu setiap negara mempunyai kepentingan yang berbeda-beda yang harus diperjuangkan dengan terbentuknya WG, kepentingan ini mungkin sulit terwujud karena ada kepentingan pihak lain yang harus didahulukan.

2. *International Law*

Hukum internasional merupakan salah satu alat yang bisa digunakan untuk menciptakan dan menjaga perdamaian dunia. Tetapi kelemahan utamanya adalah tidak memiliki kekuatan mengikat dan memaksa negara-negara untuk mematuhi sekaligus menerapkan sanksi terhadap setiap pelanggaran. Permasalahan hukum internasional memerlukan kekuatan yang memaksa dan sanksi yang tegas. Semakin kontroversial hukum internasional, semakin kuat penolakan terhadap hukum tersebut, dan semakin besar pula kekuatan memaksa yang diperlukan untuk mengenakan sanksi. Hukum tanpa paksaan menjadi tidak efektif, tetapi hukum yang mempunyai daya paksa akan menjadi suatu hal yang menakutkan, dan bisa menimbulkan penolakan dari masyarakat internasional. Meskipun keberadaan hukum internasional tidak efektif, diakui maupun tidak, keberadaan hukum internasional sejak

Kongres Wina 1815 hingga sekarang telah banyak membawa kemajuan dalam hubungan internasional, seperti kesepakatan pengurangan senjata nuklir dalam START, kesepakatan tentang lingkungan hidup global dalam Protokol Rio dan Kyoto, dan sebagainya.

3. *Balance of Power*

BoP dengan sistem aliansinya merupakan mekanisme manajemen konflik yang terbukti mampu menghindari konflik terbuka antar negara dan dominasi suatu negara atas negara lainnya. Jika pada masa perang, BoP diartikan dalam batasan politik dan militer, maka dalam masa damai, BoP diartikan dalam batasan yang lebih luas yang mencakup politik, militer dan ekonomi. Ada distribusi kekuatan di antara negara-negara besar. Sistem aliansi mengalami pergeseran, dari aliansi bersifat ketat dan didasarkan pada ideologi, seperti Blok Barat/NATO (kapitalis liberal) dan Blok Timur/Pakta Warsawa (Sosialis Komunis), menjadi aliansi yang bersifat longgar dan lebih didasarkan atas kepentingan dibandingkan ideologi. Ini dilihat dari masuknya negara-negara Eropa Timur (Polandia, Hungaria, Czekoslovakia) ke dalam NATO, dan pembentukan *Common Foreign and Security Policy* (CFSP). Selain itu, sejalan dengan regionalisme, aliansi ini meluas pada kepentingan ekonomi seperti dalam pembentukan Masyarakat Ekonomi Eropa, NAFTA, AFTA, APEC dan sebagainya.

WG dan BoP dalam beberapa hal bertentangan. WG berarti satu sentral otoritas, kekuatan dunia tunggal yang permanen dan kekuatan ini diwujudkan dalam tindakan. Sedangkan BoP mempunyai beberapa otoritas berdaulat yang masing-masing mengontrol kekuatannya. Bagi masyarakat internasional, WG tidak bisa diwujudkan, tetapi sistem BoP juga tidak memberi jaminan bisa dicegah, terutama perang antar etnis dalam suatu negara atau kawasan. Disinilah muncul ide tentang keamanan bersama untuk menciptakan dan menjaga perdamaian dunia.

4. *Collective Security*

CS memungkinkan negara-negara untuk menyerahkan penggunaan kekuatan dengan jaminan bahwa negara-negara ini akan dibantu jika ada negara lain yang mengancam keamanannya. Sejalan dengan ini, CS memerlukan partisipasi semua negara untuk menghukum agresor, dan tindakan netral atau isolasi tidak dibenarkan. Penggunaan kekerasan untuk memaksa pihak lain dalam perundingan tidak dibenarkan. Penggunaan kekerasan untuk memaksa pihak lain dalam perundingan tidak dibenarkan, tetapi meminta anggota-anggotanya untuk menggunakan kekerasan untuk menghukum setiap pelanggaran baik yang dilakukan oleh anggota maupun pihak ketiga. Dalam sistem ini, setiap anggota tetap memiliki kebebasan dan berdaulat. Negara-negara ini bebas mengejar kepentingan nasionalnya, bersaing dalam ekonomi perdagangan, dan menjalankan pemerintahan dalam negeri sesuai dengan keinginan dan kebutuhan negara yang bersangkutan (Ziegler, 1984: 186).

Sistem CS bisa berjalan di bawah institusi internasional seperti PBB dengan Dewan Keamanan, yang berfungsi mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional. Akan tetapi ketika CS dikaitkan dengan PBB maka sistem ini sulit diwujudkan karena struktur PBB dan Dewan Keamanan tidak layak untuk didukung karena dominasi AS. Ada banyak kepentingan negara-negara pemegang hak veto yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Lebih dari lima dekade keberadaan organisasi ini, seiring dengan beberapa kemajuan usaha penjagaan perdamaian dunia (seperti UN *Peace Keeping Force*, UNEF, ONUC, UNFICYP), pelanggaran-pelanggaran internasional masih berlanjut, kesenjangan ekonomi dan sosial antara Utara dan Selatan sulit dijembatani, dan ancaman kerusakan lingkungan hidup global meningkat.

5. *Concert of Power*

Masnajemen konflik lainnya adalah CoP. Dalam sistem ini, keamanan dijaga oleh negara-negara besar seperti negara-negara Eropa Barat dan AS,

yang bekerja sama dengan negara-negara sekutu kondisionalnya, dengan kesepakatan-kesepakatan tertentu. CoP menciptakan perimbangan kekuasaan dalam batasan keseimbangan dalam posisi tawar menawar dalam suatu negosiasi atau perundingan damai, seperti yang terjadi di Eropa sekitar abad 19. CoP bersifat longgar dan tidak permanen sehingga aliansi yang terbentuk bisa berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, atau mutual trade-off di antara kedua pihak (pendukung dan yang didukung). Negara-negara berpotensi menjadi pendukung dalam sistem ini antara lain adalah China, Rusia, dan India.

Relevansi Realisme dan Idealisme Dalam Hubungan Internasional

Perubahan pola hubungan internasional selama hampir dua dekade terakhir memberi pengaruh besar dalam pergeseran satu pendekatan kepada pendekatan lainnya (realisme ke idealisme/utopianisme). Pada dasarnya pergeseran ini berjalan seperti suatu siklus yang pada suatu waktu idealisme menjadi dominan, dan pada waktu yang lain realisme lebih dominan dan seterusnya, tergantung perubahan isu, situasi dan kondisi politik dan hubungan internasional.

Perubahan ini tidak menghilangkan teori-teori hubungan internasional yang sudah menjelaskan fenomena-fenomena internasional sejak sistem negara modern terbentuk tahun 1948, hingga saat ini. Baik realisme maupun idealisme dalam beberapa hal masih relevan dalam menjawab permasalahan-permasalahan kontemporer. Meskipun realisme kurang populer, realisme masih bisa menjelaskan perubahan. Ini tidak berarti bahwa realisme kehilangan relevansinya sama sekali karena dalam beberapa kasus realisme masih diakui keabsahannya, seperti manajemen konflik dengan perimbangan kekuasaan dan aliansi. Begitu pula halnya dengan idealisme/utopianisme. Tidak semua asumsi dan pemikiran pendekatan ini relevan dalam hubungan internasional kontemporer, seperti ide-ide tentang pemerintahan dunia yang sangat sulit untuk diterapkan. Tetapi di lain pihak, perlunya

hukum internasional masih tetap diperjuangkan penerapannya oleh banyak aktor internasional.

Ada kecenderungan yang kuat bahwa semakin kompleksnya permasalahan internasional membutuhkan teori yang komprehensif yang membutuhkan kolaborasi dari berbagai teori sebagai alat analisa hubungan internasional. Kondisi seperti ini juga membawa pada munculnya aliran-aliran baru yang merevisi teori-teori lama agar teori yang bersangkutan tetap relevan dalam menjawab permasalahan internasional yang berkembang, seperti halnya kemunculan neorealis yang melengkapi pemikiran realisme yang dikembangkan Kenneth Waltz, dan neoliberalisme yang melengkapi pemikiran idealisme dan liberalisme yang dikembangkan oleh Robert Keohane dan Josep Nye.

Referensi

- Bett, Richard K. 1994. *Conflict After the Cold War: Argument on Causes of War and Peace*. MacMillan, New York.
- Fontaine, Pascal. 1995. *Europe in Ten Points*. 3rd ed. European Documentations, Brussel.
- Jacobson, Harold K. 1979. *Network of Interdependence: International Organizations and the Global Political System*. Alfred A.Knof. New York.
- Jomo. 1997. The World Bank's East Asian Miracle, dalam *South East Asia's Missunderstanding Miracle*. Cambridge.
- Jones, Walter S. 1991. *The Logic of International Relations*. 7th edition, Harper Collins Publisher, New York.
- Kegley, Charles W., JR., and Eugene Wittkopf. 1989. *World Politics: Trend and Transformation*, 3rd edition, MacMillan, New York.
- Miller, Lynn H. 1990. *Global Order: Values and Power in International Politics*, 2nd ed. West View Press, Inc., New York.
- Morgenthau, Hans J. 1967. *Politics Among Nations*, 4th ed. Alfred A.Knopf, New York.
- Papp, Daniel S. 1988. *Contemporary International Relations: Framework for Understanding*, 2nd edition, MacMillan, New York.
- Pearson, Frederick S., and J.Martin Rochester. 1992. *International Relations: The Global Condition in the Late Twentieth Century*, 3rd edition, McGraw-Hill, Inc., USA.
- Rourke, Jame L. 1989. *Taking Sides: Clashing Views on Controversial Issues in World Politics*, 2nd edition, The Dushkin Publishing Group Inc., USA.

UNESCO Studies on Peace and Conflict, Peace and Conflict Issues After the Cold War. 1992. France, UNESCO.

Ziegler, David W. 1984. *War, Peace and International Politics*, 3rd edition, Little, Brown and Company, Canada.